

**ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2024 : DOMINASI BELANJA OPERASI DAN DAMPAKNYA PADA
PEMBANGUNAN DAERAH**

Aldri Frinaldi¹, Teddy Pratama^{2*}, Asnil³, Nora Eka Putri⁴

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang^{1,2,3,4}

e-mail: teddypratama54@gmail.com*, aldri@fis.unp.ac.id, asnil81@ft.unp.ac.id,
noraekaputri@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan alokasi belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 dengan menitikberatkan pada dominasi belanja operasi serta implikasinya terhadap pembangunan daerah. Struktur APBD menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Agam tahun 2024 mencapai Rp1,67 triliun, dengan porsi belanja operasi sebesar Rp1,30 triliun atau sekitar 77 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik hanya dialokasikan sebesar Rp165,78 miliar atau sekitar 9,8 persen. Ketimpangan alokasi ini menggambarkan keterbatasan ruang fiskal yang dialami pemerintah daerah dalam melakukan investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD Kabupaten Agam Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi belanja operasi terutama disebabkan oleh tingginya beban belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah, yang secara keseluruhan menyerap sebagian besar sumber daya anggaran. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jaringan irigasi, dan gedung pelayanan publik. Dampak dominasi belanja operasi terlihat pada terhambatnya percepatan pembangunan daerah, terbatasnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik, serta rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi produktif. Situasi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan penganggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi belanja serta peningkatan proporsi belanja modal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, rasionalisasi belanja yang kurang produktif, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Belanja Daerah, Pembangunan Daerah, Kebijakan Fiskal*

ABSTRACT

This study aims to analyze the expenditure allocation policy of Agam Regency in the Fiscal Year 2024, with a particular focus on the dominance of operational expenditure and its implications for regional development. The 2024 local government budget (APBD) of Agam Regency amounts to approximately IDR 1.67 trillion, of which operational expenditure accounts for IDR 1.30 trillion, or about 77 percent of total spending. Meanwhile, capital expenditure expected to play a strategic role in promoting infrastructure development and improving public services is allocated only IDR 165.78 billion, or around 9.8 percent. This imbalance illustrates the limited fiscal space faced by the regional government in making long-term, productivity-oriented investments essential for stimulating regional economic growth. This research employs a qualitative descriptive method using secondary data sourced from the

APBD document of Agam Regency for the 2024 fiscal year. The findings reveal that the dominance of operational expenditure is primarily attributed to the high burden of personnel expenditure, goods and services expenditure, and grants, all of which absorb a substantial portion of fiscal resources. Consequently, this condition restricts the government's flexibility in allocating funds for capital expenditure that directly supports the development of strategic infrastructure such as roads, irrigation networks, and public facilities. The dominance of operational expenditure has significant implications for regional development, including the slower pace of infrastructure expansion, limited improvement in the quality of public facilities, and reduced government capacity to stimulate productive economic sectors. These conditions highlight the need for a more efficiency-oriented budgeting policy and an increased allocation for capital expenditure. This study recommends strengthening fiscal capacity through the optimization of locally generated revenues (PAD), rationalizing less productive expenditures, and implementing performance-based budgeting to ensure that regional development progresses more effectively, sustainably, and with tangible benefits for public welfare.

Keywords : *Regional Expenditure, Regional Development, Fiscal Policy.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar fundamental yang memegang peranan vital sebagai instrumen strategis dalam merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan serta mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dalam kerangka otonomi daerah yang berlaku saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh sekaligus tanggung jawab besar untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri. Amanat otonomi ini menuntut adanya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, di mana pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan koridor regulasi undang-undang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang berlaku (Sariono & Sitorus, 2024; Wulandari & Hapsari, 2021). Secara normatif dan ideal, APBD bukan sekadar dokumen angka administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal utama daerah yang harus didesain untuk menstimulasi pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan fiskal ini seyogianya difokuskan pada peningkatan alokasi belanja modal, penguatan investasi publik, serta penyediaan infrastruktur layanan publik yang berkualitas guna menjamin keberlanjutan ekonomi daerah di masa depan (Andriyani et al., 2020; Ulfa & Frinaldi, 2025).

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan panduan yang jelas mengenai tata kelola anggaran yang ideal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih bergulat dengan tantangan struktural yang pelik dalam penyusunan APBD. Fenomena yang paling mencolok dan menjadi isu kronis adalah dominasi belanja operasi yang sangat masif, menyerap porsi terbesar dari total kue anggaran daerah. Kategori belanja operasi ini, yang mencakup komponen belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa habis pakai, dana hibah, serta bantuan sosial, memiliki karakteristik yang cenderung bersifat rutin dan wajib bayar. Sifat pengeluaran ini umumnya habis pakai dan tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas produktif atau aset daerah dalam jangka panjang. Sebaliknya, belanja modal yang memiliki fungsi vital sebagai mesin penggerak pengembangan infrastruktur fisik, peningkatan produktivitas ekonomi, dan akselerator pembangunan, sering kali mendapatkan porsi sisa yang minim. Ketimpangan alokasi antara belanja konsumtif dan belanja investasi ini secara sistematis mempersempit ruang fiskal (*fiscal space*) yang dimiliki pemerintah daerah untuk melakukan manuver investasi strategis yang diperlukan (Habibani et al., 2025; Wahyudi & Kurniawati, 2022; Yasin, 2020).

Cerminan nyata dari kesenjangan antara idealisme teoritis penganggaran dan realitas pragmatis di lapangan terlihat sangat kontras dalam postur APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan data peraturan daerah setempat, struktur anggaran daerah menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam antara alokasi untuk kebutuhan operasional birokrasi dengan kebutuhan pembangunan riil. Dari total belanja daerah yang ditetapkan mencapai lebih dari satu triliun enam ratus miliar rupiah, alokasi untuk belanja operasi mendominasi secara mutlak dengan menyerap hampir tujuh puluh delapan persen dari total anggaran. Sementara itu, alokasi untuk belanja modal yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil, yakni di bawah sepuluh persen. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan raya, jaringan irigasi pertanian, fasilitas pendidikan, serta sarana kesehatan menjadi sangat terbatas. Struktur anggaran yang timpang ini menegaskan adanya deviasi yang signifikan dari prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil pembangunan jangka panjang.

Kesenjangan struktural dalam pengelolaan anggaran ini semakin diperkuat validitasnya oleh berbagai temuan empiris dari studi-studi terdahulu yang menyoroti dampak negatif dari dominasi belanja rutin. Literatur akademik secara konsisten menunjukkan bahwa tingginya porsi belanja operasi memiliki korelasi negatif terhadap elastisitas anggaran pembangunan, artinya setiap kenaikan anggaran tidak diikuti oleh kenaikan output infrastruktur yang proporsional. Sebaliknya, daerah-daerah yang mampu mengalokasikan belanja modal dengan proporsi yang signifikan, idealnya di atas angka psikologis dua puluh persen, terbukti memiliki performa pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan kualitas layanan publik yang lebih prima dibandingkan daerah dengan belanja modal rendah. Ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer pusat yang kemudian habis digunakan untuk belanja operasional birokrasi terbukti menurunkan efisiensi anggaran dan memperlambat laju transformasi ekonomi daerah. Fenomena inefisiensi ini menjadi peringatan serius bahwa pola penganggaran yang bersifat "bisnis seperti biasa" (*business as usual*) tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Dari perspektif teoritis ekonomi publik, belanja modal diposisikan sebagai bentuk investasi daerah (*regional investment*) yang krusial untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian lokal. Berbeda dengan belanja rutin yang dampak ekonominya selesai saat transaksi terjadi, belanja modal memiliki efek pengganda atau *multiplier effect* yang jauh lebih besar dan berjangka panjang (Marseno & Mulyani, 2020). Teori pembentukan modal (*capital formation*) menegaskan bahwa akumulasi aset fisik melalui belanja infrastruktur akan meningkatkan kapasitas produksi daerah, menurunkan biaya logistik, dan menarik investasi swasta masuk (Dinarjito & Dharmazi, 2020; Kurniawan & Ihsan, 2021; Winarni et al., 2020). Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan untuk belanja modal seharusnya dipandang sebagai benih yang akan menumbuhkan pohon ekonomi di masa depan. Studi-studi kontemporer juga mendukung pandangan bahwa produktivitas regional sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur publik yang memadai. Oleh karena itu, pergeseran paradigma dari penganggaran yang bersifat konsumtif menuju penganggaran yang bersifat produktif investasi merupakan prasyarat mutlak bagi daerah untuk dapat bersaing dan berkembang secara mandiri di era desentralisasi fiskal saat ini.

Melihat kondisi spesifik di Kabupaten Agam dengan porsi belanja modal yang sangat minim di bawah sepuluh persen, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai sinyal keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan ekspansi investasi publik yang produktif. Padahal, ketersediaan infrastruktur dasar yang handal merupakan fondasi utama bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi baru, peningkatan kualitas hidup warga, serta percepatan

pengembangan kawasan-kawasan strategis yang potensial. Situasi ini menjadi semakin paradoks ketika dihadapkan pada tren kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring pertumbuhan populasi dan tuntutan modernisasi. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dominasi belanja operasi dan strategi untuk merestrukturisasi APBD menjadi sangat relevan dan mendesak. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang fundamental untuk membalikkan tren ini, tujuan pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat akan sulit tercapai secara optimal karena terhambat oleh keterbatasan dukungan infrastruktur finansial yang memadai.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) yang komprehensif untuk menjawab permasalahan tersebut. Pertama, penelitian ini menggunakan basis data primer terbaru dari APBD Kabupaten Agam Tahun 2024, sehingga memberikan potret paling aktual mengenai kesehatan fiskal daerah. Kedua, analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada deskripsi angka nominal dan persentase, tetapi melakukan sintesis mendalam dengan mengaitkannya pada teori kebijakan fiskal modern serta tren penelitian satu dekade terakhir. Pendekatan ini memberikan pemahaman utuh mengenai kesenjangan antara harapan normatif regulasi dengan realitas empiris di lapangan. Ketiga, dan yang paling krusial, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan aplikatif, berupa strategi konkret penguatan belanja modal melalui mekanisme efisiensi belanja operasi, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta penerapan disiplin penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan evaluatif yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan reformasi anggaran demi masa depan pembangunan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk membedah secara mendalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024. Pemilihan metode ini didasarkan pada urgensi untuk memberikan gambaran yang komprehensif, faktual, dan mendetail mengenai pola alokasi sumber daya finansial daerah, khususnya dalam membandingkan proporsi antara belanja operasi dan belanja modal. Fokus utama kajian diarahkan pada upaya identifikasi kecenderungan dominasi belanja operasi yang sering kali membebani postur anggaran, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur vital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menyajikan data numerik semata, melainkan juga menggali konteks dan prioritas kebijakan yang melatarbelakangi keputusan penganggaran tersebut, sehingga dapat dipahami bagaimana strategi pengelolaan anggaran daerah dijalankan dalam merespons kebutuhan pembangunan yang dinamis di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder yang bersifat otoritatif dan legal-formal. Objek material utama yang dianalisis adalah dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memuat rincian pos-pos pengeluaran yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer yang menjadi basis analisis utama. Selain regulasi primer tersebut, data pendukung juga dihimpun secara komprehensif dari berbagai dokumen resmi lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), laporan realisasi anggaran, serta publikasi relevan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan dokumen-dokumen resmi pemerintah ini bertujuan untuk menjamin

validitas, akurasi, dan reliabilitas data, mengingat sifatnya yang merupakan produk hukum dan kebijakan publik yang telah disahkan. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi kelengkapannya untuk memastikan konsistensi informasi sebelum melangkah ke tahap klasifikasi dan analisis lebih lanjut.

Prosedur analisis data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses dimulai dengan klasifikasi pos belanja daerah ke dalam kategori belanja operasi dan belanja modal, dilanjutkan dengan perhitungan manual persentase kontribusi masing-masing jenis belanja terhadap total belanja daerah guna menjaga akurasi dan objektivitas perhitungan. Hasil perhitungan matematis tersebut kemudian dianalisis secara komparatif dengan standar ideal pengelolaan keuangan daerah serta temuan riset terdahulu untuk menilai kewajaran alokasi anggaran. Langkah terakhir melibatkan interpretasi mendalam terhadap implikasi kebijakan dari dominasi belanja operasi terhadap *fiscal space* atau ruang fiskal pembangunan daerah. Melalui teknik ini, peneliti menyintesis data angka menjadi narasi kebijakan yang bermakna, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid mengenai efektivitas prioritas anggaran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa terjebak pada asumsi-asumsi spekulatif di luar data dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari analisis dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024. Hasil penelitian disajikan terlebih dahulu untuk menggambarkan kondisi objektif struktur belanja daerah, sedangkan bagian pembahasan akan menginterpretasikan temuan tersebut berdasarkan teori, penelitian mutakhir, dan konteks kebijakan pembangunan daerah. Penyajian hasil dan pembahasan dilakukan secara sistematis agar memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dominasi belanja operasi dan implikasinya terhadap ruang fiskal pembangunan daerah.

Hasil

Sebelum menyajikan data dalam bentuk tabel, bagian hasil ini memberikan penjelasan mengenai proses analisis yang telah dilakukan untuk memahami struktur belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024. Analisis ini berfokus pada identifikasi pola alokasi anggaran berdasarkan kelompok belanja yang ditetapkan dalam APBD. Penelitian dilakukan melalui telaah dokumen resmi APBD, penelusuran proporsi belanja, serta pengelompokan komponen belanja sesuai klasifikasi keuangan daerah. Pendekatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana anggaran daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, investasi pembangunan, penanganan darurat, dan transfer ke pihak ketiga atau pemerintahan nagari.

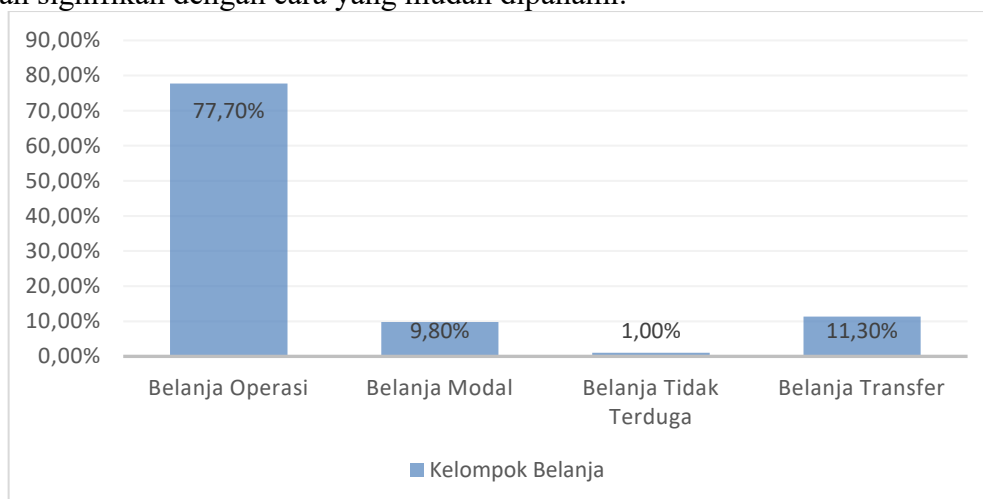
Selain itu, penelitian menekankan pentingnya memahami hubungan antarpos belanja untuk melihat kecenderungan kebijakan fiskal daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, data yang ditampilkan tidak hanya menunjukkan nominal alokasi, tetapi juga proporsi masing-masing kelompok belanja terhadap total anggaran. Penyajian angka dalam bentuk proporsi ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai keseimbangan anggaran. Setelah gambaran umum dijelaskan, Tabel 1 disajikan sebagai representasi visual yang merangkum hasil analisis secara ringkas dan sistematis. Tabel ini memberikan gambaran komposisi belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 serta memperlihatkan proporsi setiap kelompok belanja dalam keseluruhan anggaran, sehingga

memudahkan pembaca memahami struktur alokasi fiskal dan kecenderungan prioritas pengeluaran pemerintah daerah.

Tabel 1. Struktur Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Kelompok Belanja	Jumlah (Rp)	Proporsi dalam Persen
1	Belanja Operasi	1.303.717.127.056	77,8
2	Belanja Modal	165.784.221.054	9,8
3	Belanja Tidak Terduga	18.045.419.050	1,0
4	Belanja Transfer	190.130.846.855	11,4
5	Total Belanja	1.677.677.614.015	100

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan antar jenis belanja, Gambar 1 menyajikan grafik batang horizontal yang sederhana namun informatif. Grafik ini memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara belanja operasi dengan kelompok belanja lainnya, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami proporsi dan dominasi setiap jenis belanja dalam keseluruhan anggaran. Visualisasi ini membantu menyoroti perbedaan signifikan dengan cara yang mudah dipahami.



Gambar 1. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Hasil analisis dari Tabel 1 dan Gambar 1 seperti yang terlihat diatas menunjukkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 memiliki pola yang sangat jelas menggambarkan adanya ketidakseimbangan antar kelompok belanja. Disini pada dominasi belanja operasi tampak sangat mencolok dibandingkan dengan kelompok belanja lainnya. Grafik yang disajikan memperlihatkan bahwa porsi belanja operasi jauh lebih tinggi yang mencerminkan orientasi alokasi anggaran dengan terfokus pada pemenuhan kebutuhan rutin pada umumnya dan keberlangsungan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Penyajian tabel dan grafik tersebut membantu memperlihatkan secara visual bagaimana sebagian besar anggaran diarahkan pada pos belanja yang tidak bersifat pada pengarahannya investasi jangka panjang.

Dominasi belanja operasi ini mengindikasikan bahwa anggaran pemerintah daerah banyak terserap untuk kebutuhan belanja wajib dan berulang. Kebutuhan tersebut terutama mencakup belanja yang terkait dengan sumber daya manusia, seperti gaji, tunjangan, dan hak-hak pegawai lainnya, serta belanja barang dan jasa yang mendukung operasional perangkat daerah. Selain itu, terdapat pula belanja hibah serta bantuan sosial yang menjadi komponen tetap dalam struktur belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan internal pemerintahan yang harus dipenuhi tanpa dapat

ditunda. Dengan demikian, sebagian besar alokasi anggaran tidak dapat dialihkan untuk belanja yang bersifat produktif atau strategis.

Berbeda dengan kelompok belanja operasi, belanja modal menempati proporsi yang jauh lebih kecil. Kelompok belanja ini sesungguhnya merupakan komponen yang berhubungan langsung dengan pembangunan daerah karena berkaitan dengan penambahan atau peningkatan aset tetap, seperti pembangunan jalan, irigasi, gedung pelayanan, dan infrastruktur publik lainnya. Proporsi yang kecil pada kelompok belanja ini menjadi tanda bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memperluas investasi pembangunan masih terbatas. Keterbatasan tersebut dapat berdampak pada lambatnya peningkatan kapasitas infrastruktur yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kelompok belanja tidak terduga tampak memiliki proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan kelompok belanja yang lainnya karena sejalan dengan karakteristiknya sebagai alokasi untuk kebutuhan darurat atau kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Porsi yang kecil ini mencerminkan sikap efisiensi, karena belanja jenis ini hanya digunakan ketika kondisi tertentu mengharuskannya. Sementara itu, kelompok belanja transfer menunjukkan proporsi menengah yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada pemerintah nagari dan lembaga penerima lainnya. Alokasi ini merupakan bagian dari mekanisme pemerataan fiskal di tingkat lokal yang ditujukan untuk mendukung kesinambungan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil visualisasi melalui tabel dan grafik menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup signifikan dalam struktur belanja daerah, terutama antara belanja operasi yang sangat dominan dan belanja modal yang relatif kecil. Ketidakseimbangan ini penting untuk dicermati karena secara langsung berhubungan dengan kapasitas daerah dalam melakukan pembangunan jangka panjang. Dominasi belanja operasi yang terlampaui besar berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan investasi produktif yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hasil ini menjadi dasar penting bagi analisis lanjutan pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Analisis terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 mengungkapkan sebuah fenomena ketimpangan fiskal yang cukup tajam antara belanja yang bersifat konsumtif dan produktif. Data menunjukkan bahwa hampir delapan puluh persen dari total anggaran daerah terserap sepenuhnya untuk pos belanja operasi, sementara alokasi untuk belanja modal yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang tidak mencapai sepuluh persen. Ketimpangan yang sangat mencolok ini mengindikasikan bahwa fungsi alokasi anggaran pemerintah daerah belum berjalan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Anggaran daerah saat ini lebih banyak berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan birokrasi pemerintahan semata, daripada sebagai stimulus pembangunan infrastruktur publik. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana besarnya beban operasional birokrasi secara signifikan menggerus kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas melalui penyediaan aset-aset publik yang berkualitas (Surahmi et al., 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025).

Dominasi belanja operasi yang sangat masif tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik komponen penyusunnya yang bersifat kaku atau *rigid*. Sebagian besar alokasi pada pos ini tersedot untuk membiayai belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, serta belanja

barang dan jasa yang merupakan kebutuhan rutin perkantoran. Dalam perspektif tata kelola keuangan, jenis pengeluaran ini sering dikategorikan sebagai *mandatory spending* atau belanja wajib yang sulit untuk dikurangi dalam jangka pendek karena menyangkut hak-hak aparatur dan kelancaran pelayanan dasar. Akibatnya, fleksibilitas fiskal pemerintah daerah menjadi sangat terbatas. Setiap tahunnya, anggaran seolah-olah sudah "terkavling" untuk kebutuhan rutin sebelum sempat direncanakan untuk program-program strategis lainnya. Situasi ini menciptakan inersia anggaran, di mana pola alokasi tahun berjalan cenderung hanya mengulang pola tahun-tahun sebelumnya tanpa adanya terobosan signifikan untuk melakukan efisiensi pada sektor belanja rutin yang sebenarnya masih sangat mungkin untuk dioptimalkan (Dewabrata et al., 2022; Hermain et al., 2020).

Sebaliknya, proporsi belanja modal yang sangat minim memberikan sinyal peringatan terkait keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Agam. Belanja modal sesungguhnya merupakan "darah segar" bagi pembangunan daerah karena pengeluaran inilah yang nantinya akan terkonversi menjadi aset tetap seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung layanan publik. Ketika alokasinya ditekan hingga di bawah sepuluh persen, maka kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan peremajaan infrastruktur yang rusak maupun pembangunan infrastruktur baru menjadi sangat terhambat. Padahal, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi swasta dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rendahnya belanja modal ini secara langsung akan berdampak pada lambatnya peningkatan daya saing daerah, karena kualitas layanan publik dan konektivitas wilayah tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Kanaiya & Mustanda, 2020; Purwanto et al., 2022; Yudiastuti et al., 2025).

Dari kacamata teori ekonomi makro, rendahnya belanja modal ini berpotensi menghilangkan peluang terciptanya efek pengganda atau *multiplier effect* dalam perekonomian lokal. Berbeda dengan belanja pegawai yang dampak ekonominya cenderung terbatas pada konsumsi rumah tangga aparatur, belanja modal memiliki dampak ikutan yang jauh lebih luas. Pembangunan fisik tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal pada masa konstruksi, tetapi juga menurunkan biaya logistik dan memperlancar arus barang dalam jangka panjang. Ketika pemerintah daerah gagal mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor ini, maka stimulus ekonomi yang diharapkan dari APBD menjadi tumpul. Daerah kehilangan momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui intervensi fiskal, yang pada akhirnya dapat menyebabkan stagnasi ekonomi lokal dan tidak optimalnya upaya pengentasan kemiskinan yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan (Hutajulu et al., 2020; Rizky & Syahputra, 2022).

Fenomena yang terjadi dalam struktur APBD Kabupaten Agam ini dapat dijelaskan melalui konsep *fiscal crowding-out effect*. Kondisi ini terjadi ketika besarnya alokasi untuk belanja konsumtif rutin mendesak keluar peluang untuk melakukan investasi publik. Karena sumber daya anggaran bersifat terbatas, setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai inefisiensi dalam operasional birokrasi adalah rupiah yang hilang untuk pembangunan jalan atau sekolah. Dalam konteks Kabupaten Agam, tampaknya beban belanja operasi telah memakan porsi "kue" anggaran yang terlalu besar, menyisakan remah-remah untuk belanja pembangunan. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya reformasi struktural pada sisi belanja, maka daerah akan terperangkap dalam siklus anggaran yang tidak produktif, di mana kenaikan pendapatan daerah hanya akan habis untuk membiayai kenaikan biaya operasional birokrasi tanpa memberikan dampak nyata bagi pembangunan fisik wilayah.

Selain dua pos belanja utama tersebut, keberadaan belanja transfer dan belanja tidak terduga juga memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan meski proporsinya lebih kecil.

Belanja transfer mencerminkan komitmen desentralisasi fiskal ke tingkat pemerintahan terendah, yakni nagari, yang diharapkan mampu mendorong kemandirian desa. Namun, tantangannya terletak pada kapasitas nagari dalam mengelola dana tersebut agar produktif. Di sisi lain, belanja tidak terduga yang dialokasikan sebesar satu persen merupakan langkah antisipatif yang rasional mengingat kondisi geografis daerah yang rawan bencana. Meskipun angkanya kecil, pos ini berfungsi sebagai penyangga atau *buffer* fiskal. Keberadaannya menjamin bahwa pemerintah daerah memiliki likuiditas darurat untuk merespons situasi krisis tanpa harus mengganggu pos anggaran program pembangunan yang sudah berjalan, sehingga stabilitas pelayanan publik tetap terjaga di tengah ketidakpastian.

Sebagai sintesis akhir, pembahasan ini menegaskan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas belanja atau *quality of spending*. Implikasi dari dominasi belanja operasi yang berlebihan adalah sempitnya ruang gerak pemerintah untuk melakukan manuver pembangunan strategis. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan anggaran yang radikal melalui penerapan prinsip *money follow program*, bukan sekadar *money follow function*. Pemerintah daerah perlu melakukan audit efisiensi terhadap belanja barang dan jasa serta mengevaluasi beban belanja pegawai. Penghematan dari sektor operasional harus secara disiplin dialihkan untuk meningkatkan porsi belanja modal secara bertahap. Tanpa adanya keberanian untuk merestrukturisasi komposisi belanja ini, APBD hanya akan menjadi dokumen administratif tahunan yang gagal menjadi instrumen transformatif untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Agam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 menunjukkan ketidakseimbangan yang menonjol antara belanja operasi dan belanja modal. Dominasi belanja operasi mencerminkan kebijakan anggaran yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan, sementara porsi belanja modal yang rendah menunjukkan terbatasnya perhatian terhadap pembangunan jangka panjang, terutama peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Temuan ini menguatkan dugaan awal dalam Pendahuluan bahwa prioritas kebijakan fiskal daerah belum sepenuhnya berpihak pada pembangunan strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan.

Makna penting dari kondisi ini adalah bahwa efektivitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan belanja rutin dan belanja investasi. Kelebihan alokasi pada belanja operasi berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk belanja modal yang justru diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses layanan publik, dan memperkuat daya saing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi sistematis terhadap efisiensi belanja operasi serta strategi peningkatan belanja modal agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan fungsi alokasi pembangunan.

Prospek pengembangan penelitian ke depan dapat diarahkan pada analisis lebih mendalam mengenai efektivitas belanja modal pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur ekonomi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji potensi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai strategi memperluas kapasitas fiskal. Aplikasi penelitian selanjutnya juga dapat diarahkan pada penyusunan model penganggaran berbasis kinerja untuk membantu pemerintah daerah menetapkan prioritas belanja yang lebih rasional dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N., Mukhzarudfa, M., & Pa, E. D. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Dewabrata, C., Firmansyah, A., Andrias, D., Tarigan, R. P., & Trisnawati, E. (2022). Hubungan intellectual capital dan kinerja belanja pada instansi pemerintah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 368. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1830>
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Habibani, R. A., Asnil, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1905. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7823>
- Hermain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analysis of value for money income budgets government of the City of Medan. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 115. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i2.843>
- Hutajulu, D. M., Panjawa, J. L., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2020). Determinan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan wilayah induk dan pemekaran di kawasan timur Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 263. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3293>
- Kanaiya, I. P. C., & Mustanda, I. K. (2020). Kepuasan kerja memediasi hubungan kompensasi terhadap retensi karyawan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(3), 1109. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i03.p15>
- Kurniawan, A., & Ihsan, M. (2021). Infrastruktur, investasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 78. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i2.15>
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), jumlah penduduk dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>
- Purwanto, P., Indrawan, R., & Heryanti, A. N. (2022). Capital expenditure allocation analysis of local governments. *International Journal of Science Technology & Management*, 3(2), 453. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.479>
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok. *Journal of Economic Business and Accounting (COSTING)*, 7(5), 3580. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.12128>
- Surahmi, S., Ahmad, M. S., & Muttaqin, M. (2025). Evaluasi kinerja pejabat fungsional auditor di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1630. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8136>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>

- Wahyudi, S. T., & Kurniawati, L. (2022). The effect of fiscal decentralization on economic growth: A study of the province level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.24843/jekt.2022.v15.i01.p03>
- Winarni, E., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Pengaruh investasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 447. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.946>
- Wulandari, W. R., & Hapsari, A. N. S. (2021). Peran kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 400. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2195>
- Yasin, M. (2020). Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic Business and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Yudiastuti, L. N., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2025). Belanja modal memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1570>